



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena PPID merupakan pelaksana dari layanan informasi pada badan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab dan wewenang PPID yang tertera pada Pasal (6) dan Pasal (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk itu setiap badan publik harus membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada Bab VI dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 125 Tahun 2017 menerangkan dan menjelaskan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk itu dapat dilihat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu seperti pada struktur dibawah ini :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

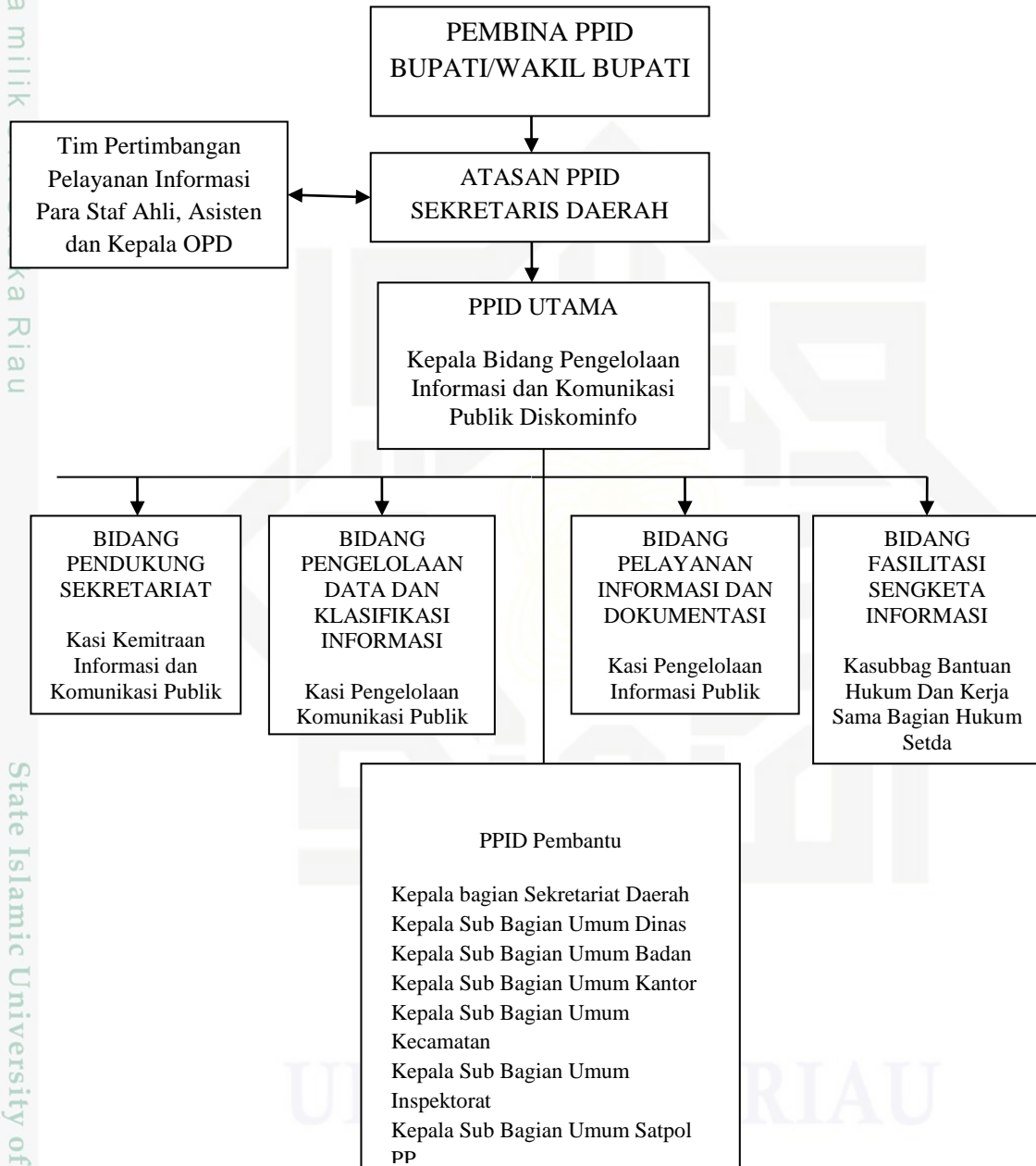
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur 4.1

Bagan Struktur Organisasi PPID di Kabupaten Indragiri Hulu





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pembina PPID mempunyai fungsi pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah, atasan PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk dengan dilandaskan oleh Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2011 yang telah diganti menjadi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 125 Tahun 2017 yang terbaru saat ini. Sebagaimana yang telah dibahas bahwa PPID Kabupaten Indragiri Hulu berada dibawah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu yang diangkat dan disahkan langsung oleh Bupati. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal utama sebagai tahap awal pelayanan informasi kepada masyarakat sudah memadai. Latar belakang pendidikan SDM rata-rata Sarjana S1 (Strata satu) tetapi juga diisi dengan tamatan SMA yang ahli dan cukup mahir mengoperasikan computer sebagai modalawal dalam memberikan pelayanan. PPID Kabupaten Indragiri Hulu didirikan murni menggunakan APBD Kabupaten Indragiri Hulu karena PPID sendiri merupakan langkah atau terobosan langsung yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu. Segala hal mengenai PPID dan pelayanan terhadap masyarakat seputar keterbukaan informasi murni bersumber dari dana APBD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim pertimbangan pelayanan informasi dijabat oleh para Asisten I, II, III dan seluruh pimpinan OPD.PPID utama Kabupaten Indragiri Hulu dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan PPID Pembantu dijabat oleh :

- a. Kepala Bagian Sekretaris Daerah
- b. Kepala Sub Bagian Umum Dinas
- c. Kepala Sub Bagian Umum Badan
- d. Kepala Sub Bagian Umum Kantor
- e. Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan
- f. Kepala Sub Bagian Umum Inspektorat
- g. Kepala Sub Bagian Umum Satpol PP
- h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD
- i. Kepala Sub Bagian Umum RSUD Indrasari.

Pembina PPID mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

Atasan PPID mempunyai tugas :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi
- b. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses kepada pemohon informasi
- c. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan
- d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan sikap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

Tim pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan
- b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi termasuk informasi yang dikecualikan
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini.

PPID utama memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi dari badan publik
- b. Melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi dari badan publik
- c. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dari badan publik
- d. Melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi publik pada Sistem Informasi Manajemen PPID (SIM-PPID)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberikan pelayanan informasi publik dalam hal informasi yang diminta secara substantive berada dalam pengelolaan beberapa badan publik
 - f. Memberikan pelayanan informasi dengan mengedepankan prinsip cepat, murah dan biaya ringan baik untuk permohonan langsung ke PPIM atau permohonan online melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM-PPID)
 - g. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi oleh masyarakat
 - h. Melaksanakan pengujian konsekuensi dalam rangka penetapan informasi yang dikecualikan beserta pengubahannya
 - i. Melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi yang berada dalam kewenangannya
- PPID pembantu memiliki beberapa tugas yaitu :
- a. Menyampaikan data dan informasi publik di lingkup OPD masing-masing kepada PPID utama
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan informasi di lingkup OPD masing-masing
 - c. Melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi di lingkup OPD masing-masing
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di lingkup OPD masing-masing
 - e. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik pada Sistem Informasi Manajemen (SIM-PPID)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memberikan pelayanan informasi dalam hal informasi yang diminta berada dalam pengelolaan OPD masing-masing
- g. Menindaklanjuti permintaan informasi yang telah didisposisikan oleh PPID utama baik yang melalui permohonan langsung ke PPIM atau permohonan online
- h. Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam pengelolaan OPD masing-masing dalam rangka penetapan informasi yang dikecualikan beserta pengubahannya
- i. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi yang berada dalam pengelolaan OPD masing-masing oleh masyarakat
- j. Melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi yang berada dalam kewenangannya baik dalam tahap nonlitigasi maupun litigasi.

4.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu telah diatur oleh peraturan bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2016. Ketentuan dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika
- b. Pelaksanaan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 1. Seksi Infrastruktur TIK
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi :

1. Seksi Hubungan Media dan Statistik Sektirial

2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Informatika

3. Seksi Tata Kelola E-Government

f. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

4.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Pengkordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika
- e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengolahan data, pengkordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan. Sekretaris memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan
- d. Pembinaan kepegawaian
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana
- f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas
- g. Penyelenggaraan fungsi kehumasan
- h. Pengelolaan keuangan
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.2.3 Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikai Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantaua, evalusai, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini an aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah. Bidang Pengelolaan Informasi dan Koomunikasi Publik menyelenggarakan beberapa fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaam media komunikasi publik di kabupaten
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten linstas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konten linstas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superbisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten linstas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten
- e. Pemantauan, evalusai dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten linstas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten

Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik membawahi :

- a. Seksi pengelolaan Komunikasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- c. Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik.

4.2.4 Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksnaaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervsi, serta pemantauan, evalusai dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten. Bidang penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-governmen*, integrasi layanan publik dan kepemrintahan, layanan kemanan informasi *e-government*, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-governmen*, integrasi layanan publik dan kepemrintahan, layanan kemanan informasi *e-government*, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kkriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, disaster recovery



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

center, dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-governmen*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan kemanan informasi *e-government*, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-governmen*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan kemanan informasi *e-government*, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten
- e. Pemantauan , evaluasi dan pelaporan dibidang infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-governmen*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan kemanan informasi *e-government*, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.

Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi :

- a. Seksi Infrastruktur TIK



- b. Seksi Pengembangan Aplikasi
- c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

4.2.5 Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, informasi, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten serta penyelenggaraan statistik sektoral. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang layanan hubungan media
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.